

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.608, 2020

LPSK. Arsip Keamanan. Dinamis.

Sistem

Klasifikasi

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan kearsipan diperlukan sistem yang memenuhi prinsip, kaidah, dan standar kearsipan yang mampu merespon tuntutan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan;

- b. bahwa untuk pengelolaan arsip dinamis dan memudahkan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanan arsip, perlu adanya sistem klasifikasi keamanan atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan, sistem klasifikasi keamanan dan hak untuk mengakses arsip dinamis di masing-masing kementerian/lembaga ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip sebagai acuan dalam pengelolaan arsip dinamis;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

Mengingat

- 13 : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

- 1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
- 3. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan Arsip Dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta Arsip untuk mempermudah pemanfaatan Arsip.
- 4. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi Arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
- 5. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan LPSK adalah acuan bagi pejabat dan pegawai terkait dalam menyediakan layanan informasi Arsip kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara

- internal maupun eksternal dengan prinsip cepat, tepat, terotorisasi dan aman.
- 6. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh Publik tidak merugikan siapapun.
- 7. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga pemerintahan.
- 8. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibarkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
- 9. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
- 10. Unit Kerja adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
- 11. Unit keArsipan adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
- 12. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan Arsip bagi kepentingan pengguna Arsip yang berhak.
- 13. Pengguna Internal adalah orang yang menggunakan Arsip yang berasal dari lingkungan LPSK.
- 14. Pengguna Eksternal adalah orang yang menggunakan Arsip yang berasal dari luar LPSK.
- 15. Publik adalah warganegara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses Arsip Dinamis.
- 16. Prosedur pengaksesan informasi publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.

- 17. Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
- 18. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

BAB II

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 2

- (1) Klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis dibedakan berdasarkan tingkat klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Biasa/Terbuka;
 - b. Terbatas; dan
 - c. Rahasia.
- (2) Tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan:
 - a. semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya; dan
 - b. semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya.
- (3) Klasifikasi Biasa/Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja LPSK.
- (4) Klasifikasi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat menganggu kinerja unit teknis di lingkungan LPSK.
- (5) Klasifikasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengandung dampak yang luas hingga dapat mengganggu kinerja LPSK seperti Arsip yang tercipta dari proses pemberian layanan perlindungan saksi dan

korban.

Pasal 3

- (1) Sarana Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan sarana perangkat keras dan perangkat lunak.
- (2) Sarana perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana penyimpanan Arsip konvensional, berupa rak
 Arsip, brankas, atau lemari besi;
 - sarana penyimpanan Arsip media baru, berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (3) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar Arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan Arsip aktif dan inaktif

Pasal 4

- (1) Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau pengelola Arsip yang bertugas mengelola Arsip merupakan pegawai yang profesional baik dalam substansi keArsipan serta memiliki dedikasi dan integritas.
- (2) Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau pengelola Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 5

(1) Penentuan Pengelola Arsip meliputi Pejabat Fungsional Arsiparis dan Pengelola Arsip di *Central File*, Pusat Arsip dan Unit Kerja LPSK.

- (2) Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip sebagai pengelola Arsip inaktif berperan dalam pengamanan Arsip di Pusat Arsip dalam menetapkan hak akses Arsip.
- (3) Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola Arsip di *central file* dan/atau unit kerja masing-masing.

BAB III

PENGAMANAN FISIK DAN INFORMASI ARSIP

Pasal 6

- (1) Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan dapat berupa:
 - a. pemasangan kamera pengawas, jika diperlukan;
 - b. kunci pengamanan ruangan; dan
 - c. media simpan Arsip.
- (2) Media simpan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. rak besi untuk Arsip Biasa/Terbuka;
 - b. rak Arsip untuk Arsip Terbatas; dan
 - c. lemari besi atau brankas untuk Arsip Rahasia.

Pasal 7

Pengamanan informasi Arsip Dinamis di lingkungan LPSK meliputi:

- a. penciptaan daftar Arsip Terbatas; dan
- b. daftar Arsip Rahasia.

Pasal 8

Tujuan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di pusat Arsip dan di *central file*.

BAB IV

PENYERAHAN ARSIP DINAMIS

Pasal 9

- (1) Untuk menjaga keamanan informasi Arsip Dinamis,I penyerahan Arsip dapat dilakukan dengan cara:
 - a. konvensional; atau
 - b. elektronik.
- (2) Penyerahan Arsip Dinamis dengan cara konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk informasi atau dokumen yang berbentuk salinan cetak.
- (3) Penyerahan Arsip Dinamis dengan cara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk informasi atau dokumen yang berbentuk salinan digital.

Pasal 10

Penyerahan Arsip Dinamis secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilakukan:

- a. dengan cara tanpa prosedur khusus, untuk Arsip Terbuka/Biasa;
- dengan cara dimasukkan dalam amplop bersegel, untuk
 Arsip Terbatas; dan
- c. dengan cara:
 - 1. menggunakan warna kertas yang berbeda;
 - 2. diberi kode rahasia;
 - 3. menggunakan amplop ganda;
 - 4. amplop bersegel dan dibubuhi stempel "RAHASIA";
 - 5. Konfirmasi tanda terima; dan
 - 6. harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian Arsip/dokumen rahasia,

untuk Arsip Rahasia.

Pasal 11

Penyerahan Arsip Dinamis secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilakukan:

- a. dengan cara tanpa prosedur khusus, untuk Arsip Terbuka/Biasa;
- b. dengan cara:
 - 1. penggunaan enkripsi;
 - 2. penggunaan alamat khusus; atau
 - 3. penggunaan sandi,

untuk Arsip Terbatas yang berisi data tentang informasi personal;

- c. dengan cara:
 - 1. pengkonfirmasian dari penerima surat elektronik;
 - 2. penggunaan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau email rahasia;
 - 3. penggunaan persandian atau kriptografi; dan
 - 4. pelacakan akses informasi untuk suatu surat elektronik,

untuk Arsip Rahasia.

BAB V

HAK AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 12

- (1) Arsip Dinamis dapat dipergunakan oleh pengguna yang diberikan hak akses.
- (2) Pengguna yang diberikan hak akses sebagiamana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengguna Internal; dan
 - b. Pengguna Eksternal.

Pasal 13

Pengguna Internal yang diberikan hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, yaitu:

a. Pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Pimpinan LPSK mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya.

- b. Pimpinan tingkat tinggi yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Jenderal) dan Jabatan Tinggi Pratama (Kepala Biro) mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi dan yang satu tingkat dengan unit di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
- c. Pimpinan Tingkat Menengah, yaitu jabatan Administrator (Kepala Bagian) yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, dan yang satu tingkat di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
- d. Pelaksana kebijakan yaitu Jabatan Pengawas (Kepala Sub Bagian) dan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat Klasifikasi Biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk Arsip dengan tingkat Klasifikasi Terbatas, Rahasia, dan sangat rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, pimpinan tingkat menengah, dan yang satu tingkat di atas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
- e. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

Pengguna Eksternal yang diberikan hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip dengan kategori Biasa/Terbuka;
- b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip untuk melaksanakan fungsi pengawasan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan

c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses Arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya untuk melaksanakan fungsi penegakan hukum.

Pasal 15

Tabel Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan LPSK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2020

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HASTO ATMOJO SUROYO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2020

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN TENTANG

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

TABEL KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

KODE		JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
S	KLASIFIKASI		KEAMANAN			
PK		PERUMUSAN				
		KEBIJAKAN				
00		Kajian	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Dapat mengganggu fungsi	Biro Penelaahan
		pengusulan		Tingkat Tertinggi hingga	penyelenggaraan negara, sumber	Permohonan
		perlindungan		Pejabat Tinggi Pratama	daya nasional, atau berdampak	
		saksi dan			pada ketertiban umum. Serta dapat	
		korban			menimbulkan kerugian yang serius	
					terhadap privasi, hilangnya	
					kepercayaan, serta merusak	
					kemitraan dan reputasi.	
01		Penyiapan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Dapat mengganggu fungsi	Biro Penelaahan
		kebijakan		Tingkat Tertinggi hingga	penyelenggaraan negara, sumber	Permohonan
				Pejabat Tinggi Pratama	daya nasional, atau berdampak	
					pada ketertiban umum. Serta dapat	

n yang serius nlangnya	ı merusak eputasi.	gu fungsi Biro Penelaahan	ara, sumber Permohonan	berdampak	n. Serta dapat	n yang serius	nilangnya	merusak	eputasi.
menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya	kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Dapat mengganggu fungsi	penyelenggaraan negara, sumber	daya nasional, atau berdampak	pada ketertiban umum. Serta dapat	menimbulkan kerugian yang serius	terhadap privasi, hilangnya	kepercayaan, serta merusak	kemitraan dan reputasi.
		Dapat diakses oleh Pimpinan	Tingkat Tertinggi hingga	Pejabat Tinggi Pratama					
		Rahasia							
		Perumusan	dan	penyusunan	bahan				
		02							

03	Pemberian	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Dapat mengganggu fungsi	Biro Penelaahan
	masukan		Tingkat Tertinggi hingga	penyelenggaraan negara, sumber	Permohonan
	(hearing) dan		Pejabat Tinggi Pratama	daya nasional, atau berdampak	
	dukungan			pada ketertiban umum. Serta dapat	
	dalam			menimbulkan kerugian yang serius	
	penyusunan			terhadap privasi, hilangnya	
	kebijakan			kepercayaan, serta merusak	
				kemitraan dan reputasi.	
04	Penetapan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Dapat mengganggu fungsi	Biro Penelaahan
			Tingkat Tertinggi hingga	penyelenggaraan negara, sumber	Permohonan
			Pejabat Tinggi Pratama	daya nasional, atau berdampak	
				pada ketertiban umum. Serta dapat	
				menimbulkan kerugian yang serius	

				terhadap privasi, hilangnya	
				kepercayaan, serta merusak	
				kemitraan dan reputasi.	
ЬЬ	PENELAAHAN				
	PERMOHONAN				
00	Sumper	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Dapat mengganggu fungsi	Biro Penelaahan
	Informasi		Tingkat Tertinggi hingga	penyelenggaraan negara, sumber	Permohonan
	Penerimaan		Pejabat Tinggi Pratama	daya nasional, atau berdampak	
	dan			pada ketertiban umum. Serta dapat	
	Penelahaan			menimbulkan kerugian yang serius	
	Permohonan			terhadap privasi, hilangnya	
				kepercayaan, serta merusak	
				kemitraan dan reputasi.	

0	00.00	00.00 Penerimaan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Dapat mengganggu fungsi	Biro Penelaahan
		dan		Tingkat Tertinggi hingga	penyelenggaraan negara, sumber	Permohonan
		penelaahan		Pejabat Tinggi Pratama	daya nasional, atau berdampak	
		permohonan			pada ketertiban umum. Serta dapat	
		datang			menimbulkan kerugian yang serius	
		langsung			terhadap privasi, hilangnya	
					kepercayaan, serta merusak	
					kemitraan dan reputasi.	
0	00.01	Penerimaan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Dapat mengganggu fungsi	Biro Penelaahan
		dan		Tingkat Tertinggi hingga	penyelenggaraan negara, sumber	Permohonan
		penelaahan		Pejabat Tinggi Pratama	daya nasional, atau berdampak	
		permohonan			pada ketertiban umum. Serta dapat	
		melalui surat			menimbulkan kerugian yang serius	
		elektronik			terhadap privasi, hilangnya	
					kepercayaan, serta merusak	
					kemitraan dan reputasi.	

00.02	00.02 Penerimaan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Dapat mengganggu fungsi	Biro Penelaahan
	dan		Tingkat Tertinggi hingga	penyelenggaraan negara, sumber	Permohonan
	penelaahan		Pejabat Tinggi Pratama	daya nasional, atau berdampak	
	permohonan			pada ketertiban umum. Serta dapat	
	melalui			menimbulkan kerugian yang serius	
	aplikasi daring			terhadap privasi, hilangnya	
				kepercayaan, serta merusak	
				kemitraan dan reputasi.	
00.03	Penerimaan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Dapat mengganggu fungsi	Biro Penelaahan
	dan		Tingkat Tertinggi hingga	penyelenggaraan negara, sumber	Permohonan
	penelaahan		Pejabat Tinggi Pratama	daya nasional, atau berdampak	
	permohonan			pada ketertiban umum. Serta dapat	
	melalui <i>call</i>			menimbulkan kerugian yang serius	
	center 148			terhadap privasi, hilangnya	
				kepercayaan, serta merusak	
				kemitraan dan reputasi.	

00.04	00.04 Penerimaan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Dapat mengganggu fungsi	Biro Penelaahan
	dan		Tingkat Tertinggi hingga	penyelenggaraan negara, sumber	Permohonan
	penelaahan		Pejabat Tinggi Pratama	daya nasional, atau berdampak	
	permohonan			pada ketertiban umum. Serta dapat	
	melalui			menimbulkan kerugian yang serius	
	layanan pro			terhadap privasi, hilangnya	
	aktif			kepercayaan, serta merusak	
				kemitraan dan reputasi.	
00.05	Penerimaan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Dapat mengganggu fungsi	Biro Penelaahan
	dan		Tingkat Tertinggi hingga	penyelenggaraan negara, sumber	Permohonan
	penelaahan		Pejabat Tinggi Pratama	daya nasional, atau berdampak	
	permohonan			pada ketertiban umum. Serta dapat	
	perlindungan			menimbulkan kerugian yang serius	
	darurat			terhadap privasi, hilangnya	
				kepercayaan, serta merusak	
				kemitraan dan reputasi.	

01	Hasil dan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Dapat mengganggu fungsi	Biro Penelaahan
	Tindak Lanjut		Tingkat Tertinggi hingga	penyelenggaraan negara, sumber	Permohonan
	Hasil Telaahan		Pejabat Tinggi Pratama	daya nasional, atau berdampak	
				pada ketertiban umum. Serta dapat	
				menimbulkan kerugian yang serius	
				terhadap privasi, hilangnya	
				kepercayaan, serta merusak	
				kemitraan dan reputasi.	
03	Investigasi dan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Dapat mengganggu fungsi	Biro Penelaahan
	Penilaian		Tingkat Tertinggi hingga	penyelenggaraan negara, sumber	Permohonan
			Pejabat Tinggi Pratama	daya nasional, atau berdampak	
				pada ketertiban umum. Serta dapat	
				menimbulkan kerugian yang serius	
				terhadap privasi, hilangnya	
				kepercayaan, serta merusak	
				kemitraan dan reputasi.	

PA	PERSIDANGAN				
	DAN				
	ADMINISTRASI				
	PUTUSAN				
00	Penyiapan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Dapat mengganggu fungsi	Biro Penelaahan
	persidangan		Tingkat Tertinggi hingga	penyelenggaraan negara, sumber	Permohonan
			Pejabat Tinggi Pratama	daya nasional, atau berdampak	
				pada ketertiban umum. Serta dapat	
				menimbulkan kerugian yang serius	
				terhadap privasi, hilangnya	
				kepercayaan, serta merusak	
				kemitraan dan reputasi.	
01	Administrasi	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Dapat mengganggu fungsi	Biro Penelaahan
	Putusan Rapat		Tingkat Tertinggi hingga	penyelenggaraan negara, sumber	Permohonan
	Paripurna		Pejabat Tinggi Pratama	daya nasional, atau berdampak	

	u							
	Biro Penelaahan	Permohonan						
pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi .	Dapat mengganggu fungsi	penyelenggaraan negara, sumber	daya nasional, atau berdampak	pada ketertiban umum. Serta dapat	menimbulkan kerugian yang serius	terhadap privasi, hilangnya	kepercayaan, serta merusak	kemitraan dan reputasi .
	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tingkat Tertinggi hingga	Pejabat Tinggi Pratama					
	Rahasia							
	01.00 Putusan	diterima						
	01.00							

01.01	01.01 Putusan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Dapat mengganggu fungsi	Biro Penelaahan
	ditolak		Tingkat Tertinggi hingga	penyelenggaraan negara, sumber	Permohonan
			Pejabat Tinggi Pratama	daya nasional, atau berdampak	
				pada ketertiban umum. Serta dapat	
				menimbulkan kerugian yang serius	
				terhadap privasi, hilangnya	
				kepercayaan, serta merusak	
				kemitraan dan reputasi .	
01.02	Putusan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Dapat mengganggu fungsi	Biro Penelaahan
	ditolak dan		Tingkat Tertinggi hingga	penyelenggaraan negara, sumber	Permohonan
	diberikan		Pejabat Tinggi Pratama	daya nasional, atau berdampak	
	rekomendasi			pada ketertiban umum. Serta dapat	
				menimbulkan kerugian yang serius	
				terhadap privasi, hilangnya	
				kepercayaan, serta merusak	
				kemitraan dan reputasi .	

.10	01.03 Putusan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Dapat mengganggu fungsi	Biro Penelaahan
	dihentikan		Tingkat Tertinggi hingga	penyelenggaraan negara, sumber	Permohonan
			Pejabat Tinggi Pratama	daya nasional, atau berdampak	
				pada ketertiban umum. Serta dapat	
				menimbulkan kerugian yang serius	
				terhadap privasi, hilangnya	
				kepercayaan, serta merusak	
				kemitraan dan reputasi .	
.10	01.04 Putusan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Dapat mengganggu fungsi	Biro Penelaahan
	diperpanjang		Tingkat Tertinggi hingga	penyelenggaraan negara, sumber	Permohonan
			Pejabat Tinggi Pratama	daya nasional, atau berdampak	
				pada ketertiban umum. Serta dapat	
				menimbulkan kerugian yang serius	
				terhadap privasi, hilangnya	
				kepercayaan, serta merusak	
				kemitraan dan reputasi .	

	01.05	01.05 Putusan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Dapat mengganggu fungsi	Biro Penelaahan
		penambahan		Tingkat Tertinggi hingga	penyelenggaraan negara, sumber	Permohonan
		layanan		Pejabat Tinggi Pratama	daya nasional, atau berdampak	
					pada ketertiban umum. Serta dapat	
					menimbulkan kerugian yang serius	
					terhadap privasi, hilangnya	
					kepercayaan, serta merusak	
					kemitraan dan reputasi .	
SH		PEMENUHAN				
		HAK SAKSI				
		DAN KORBAN				

00		Penyiapan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Dapat mengganggu fungsi	Biro Pemenuhan Hak
		Layanan		Tingkat Tertinggi hingga	penyelenggaraan negara, sumber	Saksi dan Korban
				Pejabat Tinggi Pratama	daya nasional, atau berdampak	
					pada ketertiban umum. Serta dapat	
					menimbulkan kerugian yang serius	
					terhadap privasi, hilangnya	
					kepercayaan, serta merusak	
					kemitraan dan reputasi.	
	00.00	Penelaahan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Dapat mengganggu fungsi	Biro Pemenuhan Hak
		Layanan		Tingkat Tertinggi hingga	penyelenggaraan negara, sumber	Saksi dan Korban
				Pejabat Tinggi Pratama	daya nasional, atau berdampak	
					pada ketertiban umum. Serta dapat	
					menimbulkan kerugian yang serius	
					terhadap privasi, hilangnya	
					kepercayaan, serta merusak	
					kemitraan dan reputasi .	

Dapat mengganggu fungsi Biro Pemenuhan Hak	penyelenggaraan negara, sumber Saksi dan Korban	daya nasional, atau berdampak	pada ketertiban umum. Serta dapat	menimbulkan kerugian yang serius	terhadap privasi, hilangnya	kepercayaan, serta merusak	kemitraan dan reputasi .	Dapat mengganggu fungsi Biro Pemenuhan Hak	penyelenggaraan negara, sumber Saksi dan Korban	daya nasional, atau berdampak	pada ketertiban umum. Serta dapat	menimbulkan kerugian yang serius	terhadap privasi, hilangnya	kepercayaan, serta merusak	kemitraan dan reputasi
Dapat me	penyelenggar	daya nasion	pada ketertiba	menimbulkan	terhadap	kepercaya	kemitraa	Dapat me	penyelenggar	daya nasion	pada ketertiba	menimbulkan	terhadap	kepercaya	kemitraa
Dapat diakses oleh Pimpinan	Tingkat Tertinggi hingga	Pejabat Tinggi Pratama						Dapat diakses oleh Pimpinan	Tingkat Tertinggi hingga	Pejabat Tinggi Pratama					
Rahasia								Rahasia							
00.01 Laporan Hasil	Penelahaan	Layanan dan	Risalah					Pelaksanaan	Pemberian	Layanan					
00.01															
								01							

01.00	01.00 Pelanggaran	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Dapat mengganggu fungsi	Biro Pemenuhan Hak
	Hak Asasi		Tingkat Tertinggi hingga	penyelenggaraan negara, sumber	Saksi dan Korban
	Manusia yang		Pejabat Tinggi Pratama	daya nasional, atau berdampak	
	Berat			pada ketertiban umum. Serta dapat	
				menimbulkan kerugian yang serius	
				terhadap privasi, hilangnya	
				kepercayaan, serta merusak	
				kemitraan dan reputasi.	
01.01	Tindak Pidana	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Dapat mengganggu fungsi	Biro Pemenuhan Hak
	Korupsi dan		Tingkat Tertinggi hingga	penyelenggaraan negara, sumber	Saksi dan Korban
	Pencucian		Pejabat Tinggi Pratama	daya nasional, atau berdampak	
	Uang			pada ketertiban umum. Serta dapat	
				menimbulkan kerugian yang serius	
				terhadap privasi, hilangnya	
				kepercayaan, serta merusak	
				kemitraan dan reputasi.	

01.02	01.02 Tindak Pidana	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Dapat mengganggu fungsi	Biro Pemenuhan Hak
	Terorisme		Tingkat Tertinggi hingga	penyelenggaraan negara, sumber	Saksi dan Korban
			Pejabat Tinggi Pratama	daya nasional, atau berdampak	
				pada ketertiban umum. Serta dapat	
				menimbulkan kerugian yang serius	
				terhadap privasi, hilangnya	
				kepercayaan, serta merusak	
				kemitraan dan reputasi.	
01.03	Tindak Pidana	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Dapat mengganggu fungsi	Biro Pemenuhan Hak
	Perdagangan		Tingkat Tertinggi hingga	penyelenggaraan negara, sumber	Saksi dan Korban
	Orang		Pejabat Tinggi Pratama	daya nasional, atau berdampak	
				pada ketertiban umum. Serta dapat	
				menimbulkan kerugian yang serius	
				terhadap privasi, hilangnya	
				kepercayaan, serta merusak	
				kemitraan dan reputasi.	

01.04	01.04 Narkotika dan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Dapat mengganggu fungsi	Biro Pemenuhan Hak
	Psikotropika		Tingkat Tertinggi hingga	penyelenggaraan negara, sumber	Saksi dan Korban
			Pejabat Tinggi Pratama	daya nasional, atau berdampak	
				pada ketertiban umum. Serta dapat	
				menimbulkan kerugian yang serius	
				terhadap privasi, hilangnya	
				kepercayaan, serta merusak	
				kemitraan dan reputasi.	
01.05	Tindak Pidana	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Dapat mengganggu fungsi	Biro Pemenuhan Hak
	Kekerasan		Tingkat Tertinggi hingga	penyelenggaraan negara, sumber	Saksi dan Korban
	Seksual		Pejabat Tinggi Pratama	daya nasional, atau berdampak	
				pada ketertiban umum. Serta dapat	
				menimbulkan kerugian yang serius	
				terhadap privasi, hilangnya	
				kepercayaan, serta merusak	
				kemitraan dan reputasi.	

Biro Pemenuhan Hak	r Saksi dan Korban		at	18				Biro Pemenuhan Hak	r Saksi dan Korban		at	18			
Dapat mengganggu fungsi	penyelenggaraan negara, sumber	daya nasional, atau berdampak	pada ketertiban umum. Serta dapat	menimbulkan kerugian yang serius	terhadap privasi, hilangnya	kepercayaan, serta merusak	kemitraan dan reputasi.	Dapat mengganggu fungsi	penyelenggaraan negara, sumber	daya nasional, atau berdampak	pada ketertiban umum. Serta dapat	menimbulkan kerugian yang serius	terhadap privasi, hilangnya	kepercayaan, serta merusak	kemitraan dan reputasi.
Dapat diakses oleh Pimpinan	Tingkat Tertinggi hingga	Pejabat Tinggi Pratama						Dapat diakses oleh Pimpinan	Tingkat Tertinggi hingga	Pejabat Tinggi Pratama					
Rahasia								Rahasia							
01.06 Tindak Pidana	Penyiksaan							Tindak Pidana	Penganiayaan	Berat					
01.06								01.07							

	01.08	01.08 Tindak Pidana	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Dapat mengganggu fungsi	Biro Pemenuhan Hak
		Lainnya		Tingkat Tertinggi hingga	penyelenggaraan negara, sumber	Saksi dan Korban
				Pejabat Tinggi Pratama	daya nasional, atau berdampak	
					pada ketertiban umum. Serta dapat	
					menimbulkan kerugian yang serius	
					terhadap privasi, hilangnya	
					kepercayaan, serta merusak	
					kemitraan dan reputasi.	
02		Laporan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Dapat mengganggu fungsi	Biro Pemenuhan Hak
		Pelaksanaan,		Tingkat Tertinggi hingga	penyelenggaraan negara, sumber	Saksi dan Korban
		Monitoring,		Pejabat Tinggi Pratama	daya nasional, atau berdampak	
		dan Evaluasi			pada ketertiban umum. Serta dapat	
		Layanan			menimbulkan kerugian yang serius	
		Pemenuhan			terhadap privasi, hilangnya	
		Hak Saksi dan			kepercayaan, serta merusak	
		Korban			kemitraan dan reputasi.	

l		Paska	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Dapat mengganggu fungsi	Biro Pemenuhan Hak
		Pemenuhan		Tingkat Tertinggi hingga	penyelenggaraan negara, sumber	Saksi dan Korban
		Hak Saksi dan		Pejabat Tinggi Pratama	daya nasional, atau berdampak	
		Korban			pada ketertiban umum. Serta dapat	
					menimbulkan kerugian yang serius	
					terhadap privasi, hilangnya	
					kepercayaan, serta merusak	
					kemitraan dan reputasi.	
1	03.00	Paska Layanan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Dapat mengganggu fungsi	Biro Pemenuhan Hak
		Pemenuhan		Tingkat Tertinggi hingga	penyelenggaraan negara, sumber	Saksi dan Korban
		Hak Saksi dan		Pejabat Tinggi Pratama	daya nasional, atau berdampak	
		Korban			pada ketertiban umum. Serta dapat	
					menimbulkan kerugian yang serius	
					terhadap privasi, hilangnya	
					kepercayaan, serta merusak	
					kemitraan dan reputasi.	

03.01	Laporan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Dapat mengganggu fungsi		Biro Pemenuhan Hak
	Pemantauan		Tingkat Tertinggi hingga	penyelenggaraan negara, sumber	Saksi dan Korban
	Paska Layanan		Pejabat Tinggi Pratama	daya nasional, atau berdampak	
				pada ketertiban umum. Serta dapat	
				menimbulkan kerugian yang serius	
				terhadap privasi, hilangnya	
				kepercayaan, serta merusak	
				kemitraan dan reputasi.	

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN B.

KODE		JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
KLASIFIKASI	IKASI		KEAMANAN			
PR		PERENCANAAN				
00		Pokok-Pokok	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Perencanaan
		Kebijakan dan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	dan Keuangan
		Strategi		Pengawas		
		Pembangunan				
	00.00	Rencana				
		Pembangunan				
		Jangka Panjang				
		/ Master Plan				
		(RPJP)				

	00.01	00.01 Rencana				
		Pembangunan				
		Jangka				
		Menengah				
		Nasional				
		(RPJMN)				
	00.02	00.02 Musyawarah				
		Perencanaan				
		Pembangunan				
	00.03	Rencana				
		Strategis				
		(Renstra)				
01		Rencana dan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Perencanaan
		Program Kerja	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	dan Keuangan
		Tahunan (PKT)		Pengawas		

01.00	01.00 Rencana Kerja	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Perencanaan
	LPSK	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	dan Keuangan
			Pengawas		
01.01	Usulan unit	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Perencanaan
	kerja beserta	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	dan Keuangan
	data pendukung		Pengawas		
01.02	Usulan LPSK ke	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Perencanaan
	Instansi terkait	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	dan Keuangan
			Pengawas		
01.03	Program Kerja	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Perencanaan
	Tahunan Unit	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	dan Keuangan
	Kerja		Pengawas		
01.04	01.04 Program Kerja	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Perencanaan
	Tahunan LPSK	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	dan Keuangan
			Pengawas		

	01.05	01.05 Hasil Rapat	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Perencanaan
		Dengar Pendapat	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	dan Keuangan
		DPR		Pengawas		
	01.06	01.06 Rapat Pimpinan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Perencanaan
				Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	dan Keuangan
				Tinggi Pratama	LPSK	
	01.07	01.07 Rakor Internal	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Perencanaan
		LPSK		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	dan Keuangan
				Pengawas	LPSK	
	01.08	Usulan Khusus	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Perencanaan
				Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	dan Keuangan
				Pengawas	LPSK	
02		Penetapan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Perencanaan
		Kontrak Kinerja		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	dan Keuangan
	05.00	Penetapan		Pengawas	LPSK	
		Kinerja Eselon I				

		dengan Ketua				
		LPSK				
	02.01	Penetapan				
		Kinerja Unit				
		Kerja (Dapat				
		diakses oleh				
		Pimpinan				
		Tingkat Tertinggi				
		hingga Pejabat				
		Tinggi Pratama,				
		III, dan IV)				
	02.02	Indikator Kinerja				
03		Penyusunan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Perencanaan
		Laporan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	dan Keuangan
	03.00	Laporan Berkala		Pengawas		
		a. Laporan				

haria	harian unit kerja		
b. La	b. Laporan		
ming	mingguan unit		
kerja			
c. La	c. Laporan		
bula	bulanan unit		
kerja			
d. La	d. Laporan		
triwn	llan unit		
kerja			
e. Laj	e. Laporan		
seme	semesteran unit		
kerja			
f. Lar	f. Laporan		
tahm	tahunan unit		
kerja			

	g. Laporan				
	Tahunan LPSK				
	(Laptah, Laptri,				
	Lap Monev, dll)				
03.01	03.01 Laporan				
	Akuntabilitas				
	Kinerja Instansi				
	Pemerintah				
	(LAKIP) /				
	Laporan Kinerja				
	(LAKIN)				
03.02	03.02 Laporan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Perencanaan
	Insidental /	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	dan Keuangan
	Khusus		Pengawas	LPSK	
	a. Laporan				
	Pemantauan				

Bagian Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang	Dapat diakses oleh Pimpinan	Biasa/	Evaluasi Program	04
				III DPR RI	
				dengan Komisi	
				Dengar Pendapat	
				d. Laporan Rapat	
				m tertentu	
				kegiatan/progra	
				Pelaksanaan	
				c. Laporan	
				eksternal	
				permintaan	
				kegiatan atas	
				Pelaksanaan	
				b. Laporan	
				Prioritas	

_													
dan Keuangan								Bagian Perencanaan	dan Keuangan		Bagian Perencanaan	dan Keuangan	
mengganggu kinerja LPSK								Tidak memiliki dampak yang	mengganggu kinerja LPSK		Tidak memiliki dampak yang	mengganggu kinerja LPSK	
Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Pengawas							Dapat diakses oleh Pimpinan	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Pengawas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Pengawas
Terbuka								Biasa/	Terbuka		Biasa/	Terbuka	
04.00 Evaluasi	Program Unit	Kerja	Evaluasi	Program LPSK	Rekomendasi	Kinerja	Penyusunan Anggaran	05.00 Kebijakan /	Peraturan	Penganggaran	Ketetapan Pagu	Indikatif /	sementara
04.00			04.01		04.02		Penyus	02.00			05.01		
							02						

05.02	05.02 Pembahasan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Perencanaan
	Rancangan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	dan Keuangan
	Anggaran		Administrator		
	Pendapatan dan				
	Belanja Negara				
	(RAPBN) LPSK				
	dengan pihak				
	eksternal (Komisi				
	III DPR dan				
	lainnya)				
	a. Pengantar				
	Nota Keuangan				
	Pemerintah dan				
	RUU APBN				
	b. Risalah rapat				
	pembahasan				

anggaran LPSK		
dengan		
Kementerian		
Sekretariat		
Negara,		
Kementerian		
Keuangan,		
Bappenas, dan		
Komisi III DPR RI		
c. Notulen		
Pembahasan		
RUU APBN - P		
oleh Pemerintah		
dan DPR		
d. Notulen Rapat		
Paripurna		

	Persetujuan RUU APBN				
05.03	Ketetapan Pagu Definitif	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
05.04	Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) LPSK	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan

05.05	05.05 Dokumen	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Perencanaan
	Rencana	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	dan Keuangan
	Anggaran Kerja		Administrator		
	Instansi				
	Pemerintah				
	(RAKIP) dan				
	Dokumen				
	Rencana Kerja				
	Anggaran				
	Kementerian/Le				
	mbaga (RKA-				
	K/L)				
90.50	05.06 Dokumen	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Perencanaan
	Rancangan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	dan Keuangan
	Anggaran Satuan		Administrator		
	Kerja Instansi				

	Pemerintah				
	(RASKIP)				
05.07	05.07 Daftar Isian	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Perencanaan
	Pelaksanaan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	dan Keuangan
	Anggaran (DIPA),		Pengawas		
	Petunjuk				
	Operasional				
	Kegiatan (POK)				
	dan Revisinya				
05.08	05.08 Anggaran Biaya	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Perencanaan
	Tambahan (ABT)	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	dan Keuangan
			Pengawas		
02.09	05.09 Standar Biaya	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Perencanaan
	Keluaran (SBK)	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	dan Keuangan
			Pengawas		

KU	KEUANGAN	IGAN				
00	Pelaksa	Pelaksanaan Anggaran				
	00.00	00.00 Peraturan,	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Perencanaan
		Pedoman, dan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	dan Keuangan
		Kebijakan LPSK		Pengawas		
		terkait				
		Pelaksanaan				
		Penatausahaan				
		dan				
		Pertanggungjawa				
		ban Anggaran				
01	Dokum	Dokumen Realisasi	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Perencanaan
	Pendapatan	atan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	dan Keuangan
	01.00	01.00 Surat Setoran		Administrator		
		Pajak (SSP)				

01.01	01.01 Surat Setoran		
	Bukan Pajak		
	(SSBP) atau		
	Bukti Setor		
	Penerimaan		
	Negara Bukan		
	Pajak (PNBP)		
01.02	01.02 Bukti Setor Sisa		
	Anggaran Lebih		
	atau Bukti Setor		
	Pengembalian		
	Belanja		
01.03	01.03 Bukti Setor		
	Bunga dan atau		
	Jasa Giro Bank		

	01.04	01.04 Laporan				
		Realisasi				
		Pendapatan				
		Negara dari				
		Satuan Kerja				
	01.05	01.05 Laporan				
		Pengelolaan				
		Barang Milik				
		Negara				
03	Belanja	ja				
	02.00	02.00 Dokumen	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Perencanaan
		Pelaksanaan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	dan Keuangan
		Pengadaan		Administrator		
		Barang habis				
		pakai				

02.01	02.01 Dokumen	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Perencanaan
	Pelaksanaan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	dan Keuangan
	Pengadaan		Administrator		
	Barang				
	Bergerak/Barang				
	Inventaris				
02.02	02.02 Dokumen	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Perencanaan
	Pelaksanaan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	dan Keuangan
	Pengadaan		Administrator		
	Tanah dan				
	Bangunan				
02.03	02.03 Dokumen	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Perencanaan
	Pelaksanaan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	dan Keuangan
	Pengadaaan Jasa		Administrator		

02.04	02.04 Dokumen	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Perencanaan
	Pelaksanaan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	dan Keuangan
	Pengadaan		Administrator		
	Software				
	Komputer				
	Catatan yang				
	termasuk				
	dokumen				
	pengadaan				
	barang dan jasa				
	antara lain:				
	a. Pengumuman				
	lelang				
	b. Dokumen				
	prakuwalifikasi				
	c. Dokumen				

	Peninjauan		
	Lapangan		
	d. Berita Acara		
	Penjelasan		
	Pekerjaan		
	e. Berita Acara		
	Pelelangan		
	f. Usulan Calon		
	Pemenang		
	g. Penetapan		
	Pemenang		
	h. Surat Perintah		
	Kerja (SPK)		
	ı.		
	Kontrak/Addend		
	um Kontrak		

	j. Serah terima barang dan jasa				
02.05	Dokumen Pembayaran Keuangan a. Pengajuan Kebutuhan Penarikan Kas	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan

		Tagihan dari				
		Pihak Ketiga				
		c. Surat				
		Permintaan				
		Pembayaran				
		(SPP)				
		d. Surat Perintah				
		Membayar (SPM)				
		e. Surat Perintah				
		Pencairan Dana				
		(SP2D)				
		f. Surat Perintah				
		Pengesahan				
		Pendapatan				
		(SP3)				
03	Pembuk	Pembukuan Anggaran	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Perencanaan

03.00	03.00 Buku Kas Umum	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	dan Keuangan
	(BKU)	Tinggi Pratama	LPSK	
03.01	03.01 Buku Kas			
	Pembantu (BKP)			
03.02	Buku / Kartu			
	Pengawasan			
	Kredit Anggaran			
03.03	03.03 Rekening Koran			
	Bank			
03.04	03.04 Laporan			
	Pertanggungjawa			
	ban (LPJ)			
	Bendahara			
03.05	03.05 Daftar			
	Rekapitulasi			
	Keuangan (DRK)			

	03.06	03.06 Daftar				
		Rekapitulasi				
		Pihak Ketiga				
	03.07	Daftar				
		Rekapitulasi				
		PNBP				
	03.08	Izin Penggunaan				
		Kas Besi				
04	Daftar		Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Menimbulkan kerugian yang	Bagian Perencanaan
	Gaji/Tu	Gaji/Tunjangan/Lembur		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	serius terhadap privasi,	dan Keuangan
	/ Hono	/ Honorarium/Uang		Tinggi Pratama	keuntungan kompetitif,	
	Makan				hilangnya kepercayaan, serta	
					merusak kemitraan dan	
					reputasi	

02	Kartu Gaji	Jaji	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Menimbulkan kerugian yang	Bagian Perencanaan
				Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	serius terhadap privasi,	dan Keuangan
				Administrator	keuntungan kompetitif,	
					hilangnya kepercayaan, serta	
					merusak kemitraan dan	
					reputasi	
90	Dokum	Dokumen Akuntansi	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Perencanaan
	Keuangan	gan		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	dan Keuangan
	00.90	06.00 Berita Acara		Tinggi Pratama	LPSK	
		Pemeriksaan Kas				
	06.01	Kas/ Register				
		Penutupan Kas				
	06.02	Arsip Data				
		Komputer (ADK)				
	06.03	Laporan				
		Pendapatan				

		Negara				
	06.04	06.04 Laporan				
		Keadaan Kredit				
		Anggaran (LKKA)				
		bulanan/triwula				
		nan/semesteran				
	06.05	06.05 Berita Acara				
		Rekonsiliasi				
		antara Satuan				
		Kerja dan KPPN				
20	Laporai	Laporan perkembangan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Perencanaan
	realisas	realisasi penerimaan,	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	dan Keuangan
	realisas	realisasi belanja pegawai,		Administrator		
	belanja	belanja barang dan				
	belanja modal	modal				

80	Lapora	Laporan Keuangan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Perencanaan
	Tahunan	an	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	dan Keuangan
	08.00	08.00 Laporan		Administrator		
		Realisasi				
		Anggaran (LRA)				
	08.01	Neraca				
	08.02	08.02 Laporan Arus				
		Kas				
	08.03	Catatan atas				
		Laporan				
		Keuangan (CaLK)				
	08.04	Laporan TEPRA				
		(Tim Evaluasi				
		dan Pengawasan				
		Realisasi				
		Anggaran)				

	08.05	08.05 Sistem				
		Perbendaharaan				
		dan Anggaran				
		Negara (SPAN)				
	90'80	08.06 Monev	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Perencanaan
		Pelaksanaan		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	dan Keuangan
		Anggaran		Administrator	LPSK	
60	Sistem	Sistem Akuntansi				
	Instansi (SAI)	si (SAI)				
	00.60	09.00 Manual	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Perencanaan
		Implementasi	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	dan Keuangan
		dan Kebijakan		Administrator		
		Sistem				
		Akuntansi				
		Instansi (SAI)				

	09.01	09.01 Kebijakan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Perencanaan
		Akuntansi	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	dan Keuangan
				Administrator		
	09.05	Arsip Data	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Perencanaan
		Komputer dan		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	dan Keuangan
		Berita Acara		Administrator	LPSK	
		Rekonsiliasi				
		(BAR)				
	09.03	09.03 Laporan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Perencanaan
		Realisasi	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	dan Keuangan
		Bulanan		Administrator		
		/Triwulan/Seme				
		ster SAI				
10	Pertan	Pertanggungjawaban				
	Keuan	Keuangan Negara				

10.00	10.00 Laporan Hasil	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Perencanaan
	Pemeriksaan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	dan Keuangan
	atas Laporan		Administrator		
	Keuangan oleh				
	Badan				
	Pemeriksa				
	Keuangan				
	Republik				
	Indonesia				
10.01 Hasil	Hasil	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Perencanaan
	Pengawasan dan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	dan Keuangan
	Pemeriksaan		Administrator		
	Internal oleh				
	inspektorat atau				
	unit pengawasan				

	10.02	10.02 Laporan Aparat	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Perencanaan
		Pemeriksa	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	dan Keuangan
		Fungsional		Administrator		
	10.03	Dokumen	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Perencanaan
		Penyelesaian		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	dan Keuangan
		Kerugian		Tinggi Pratama	LPSK	
		Keuangan				
		Negara				
		a. Tuntutan				
		Perbendaharaan				
		b. Tuntutan				
		Ganti Rugi				
11	Bantua	Bantuan/Pinjaman Luar				
	Negeri					

11.00	11.00 Daftar Proyek-	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Perencanaan
	Proyek yang		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	dan Keuangan
	akan dibiayai		Tinggi Pratama	LPSK	
	dari Pinjaman				
	Luar Negeri (Blue				
	Book)				
11.01	11.01 Dokumen	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Perencanaan
	Kesanggupan		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	dan Keuangan
	Negara Donor		Tinggi Pratama	LPSK	
	untuk				
	Membiayai				
	(Green book)				
11.02	Dokumen	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Perencanaan
	Memorandum of		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	dan Keuangan
	Understanding		Tinggi Pratama	LPSK	
	(MoU), dan				

	Dokumen				
	Sejenisnya				
11.03	Dokumen Loan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Perencanaan
	Agreement		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	dan Keuangan
	Pinjaman/Hibah		Tinggi Pratama	LPSK	
	Luar Negeri				
	(PHLN), Opini				
	Hukum,				
	Perjanjian				
	Penerusan				
	Pinjaman dan				
	Surat Menyurat				
	dengan Lender				
11.04	11.04 Alokasi dan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Perencanaan
	Relokasi		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	dan Keuangan
	Penggunaan		Tinggi Pratama	LPSK	

	Dana				
	Pinjaman/Hibah				
	Luar Negeri,				
	antara lain:				
	usulan luncuran				
	dana				
11.05	11.05 Aplikasi	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Perencanaan
	Penarikan Dana		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	dan Keuangan
	Pinjaman/Hibah		Tinggi Pratama	LPSK	
	Luar Negeri				
	(PHLN)				
	a.				
	Reimbursement				
	b. Direct				
	Payment/Transfe				
	r Procedure				

	c. Special				
	Commitment L/C				
	Opening				
	d. Special				
	Account /				
	Imprest Fund				
	e. Dokumen				
	Pengesahan atas				
	Penerimaan				
	Hibah				
	f. Notice of				
	Disbursement				
11.0	11.06 Otorisasi	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Perencanaan
	Penarikan Dana		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	dan Keuangan
	(Payment Advice)		Tinggi Pratama	LPSK	

11	1.07	11.07 Realisasi	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Perencanaan
		Pencairan Dana		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	dan Keuangan
		Pinjaman/ Hibah		Tinggi Pratama	LPSK	
		Luar negeri,				
		yaitu: Surat				
		Perintah				
		Pencairan Dana				
		(SP2D), dan SPM				
		beserta				
		lampirannya,				
		antara lain: SPP,				
		Kontrak, Berita				
		Acara, dan Data				
		Pendukung				
		Lainnya				

11.08	11.08 Replenisment	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Perencanaan
	(Permintaan		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	dan Keuangan
	Penarikan Dana		Tinggi Pratama	LPSK	
	dari Negara				
	Donor meliputi				
	antara lain : No				
	Objection Letter				
	(NOL), Project				
	Implementation,				
	Notification of				
	Contract,				
	Withdrawal				
	Authorization				
	(WA), Statement				
	of				
	Expenditure(SE)				

	_				
11.09	11.09 Staff Appraisal	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Perencanaan
	Report	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	dan Keuangan
			Administrator		
11.10	11.10 Report /Laporan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Perencanaan
	a. Progress	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	dan Keuangan
	Report		Administrator		
	b. Monthly Report				
	c. Quarterly				
	Report				
	d. Final				
	Report/Completio				
	n Report				

				Negeri (PHLN)	Negeri	
				Pinjaman/Hibah Luar	Pinjan	
				Pengelolaan APBN/Dana	Pengel	12
				Luar Negeri		
				Pinjaman/Hibah		
		Administrator		Menyangkut		
dan Keuangan	mengganggu kinerja LPSK	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Terbuka	uran yang		
Bagian Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang	Dapat diakses oleh Pimpinan	Biasa/	11.12 Ketentuan/Perat	11.12	
				hutang negara		
				b. Laporan posisi		
				hutang negara		
				pembayaran		
		Administrator		a. Laporan		
dan Keuangan	mengganggu kinerja LPSK	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Terbuka	Negara		
Bagian Perencanaan	Tidak memiliki dampak yang	Dapat diakses oleh Pimpinan	Biasa/	11.11 Laporan Hutang	11.11	

12.00	12.00 Keputusan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Perencanaan
	Pengguna	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	dan Keuangan
	Anggaran		Administrator		
	tentang				
	Penetapan				
	a. Kuasa				
	Pengguna				
	Anggaran,				
	b. Kuasa				
	Pengguna				
	Barang / Jasa				
	c. Pejabat				
	Pembuat				
	Komitmen				
	d. Pejabat				
	Pembuat Daftar				

		Gaji				
		e. Pejabat				
		Penandatangana				
		n SPM				
		f. Bendahara				
		Penerimaan /				
		Pengeluaran				
		g. Pengelola				
		Barang termasuk				
		Berita Acara				
		Serah Terima				
		Jabatan.				
13	Verifika	Verifikasi Anggaran	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Perencanaan
	a. Nota	a. Nota Hasil Verifikasi		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	dan Keuangan
	NHV)			Tinggi Pratama	LPSK	
	b. Jawa	b. Jawaban Nota Hasil				

	Verifika	Verifikasi (JNHV)				
RT	KERUN	KERUMAHTANGGAAN				
00	Pengadaan	aan				
	00.00	00.00 Analisa	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
		Kebutuhan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
				Pengawas		
	00.01	00.01 Pertimbangan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
		Pelaksanaan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
		Pengadaan		Pengawas		
		(Penunjukan				
		Langsung/Pemili				
		han				

		Langsung/Lelan				
		g)				
	00.02	00.02 Daftar Rekanan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
		Mampu	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
				Pengawas		
	00.03	Serah Terima	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
		Barang	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
				Pengawas		
01	Pendist	Pendistribusian	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
			Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
				Pengawas		
02	Telekon	Telekomunikasi	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
			Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
				Pengawas		

03	Administrasi Penyediaan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
	Konsumsi, Ruang Rapat	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
	dan Akomodasi		Pengawas		
04	Pengurusan Kendaraan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
	Dinas	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
	1. Pengurusan surat -		Pengawas		
	surat kendaraan dinas				
	2. Pemeliharaan dan				
	perbaikan				
	3. Pengurusan				
	kehilangan dan masalah				
	kendaraan				
05	Pengelolaan Bangunan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
	Gedung dan Taman	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
			Pengawas		

90	Pengelo	Pengelolaan dan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
	Perbaik	Perbaikan Sarana dan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
	Prasarana	ına		Pengawas		
20	Penghe	Penghematan Energi	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
			Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
				Pengawas		
80	Ketertil	Ketertiban dan				
	Keamanan	nan				
	08.00	Pengamanan,	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
		penjagaan, dan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
		pengawalan		Pengawas		
		terhadap				
		pejabat, kantor				
		dan rumah dinas				
	08.01	Laporan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
		Ketertiban dan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	

		Keamanan yang		Pengawas		
		terdiri atas				
		kehilangan,				
		kerusakan,				
		kecelakaan, dan				
		gangguan.				
60	Administ	Administrasi Pengelolaan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
	Parkir		Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
				Pengawas		
10	Administ	Administrasi Pakaian	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
	Dinas Pe	Dinas Pegawai, Satpam,	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
	Petugas	Petugas Kebersihan dan		Pengawas		
	Pegawai lainnya	lainnya				
11	Pengada	Pengadaan Outsourcing	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
			Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
				Pengawas		

12	Ijin Peminjaman Sarana	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
	dan Prasarana	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
			Pengawas		
13	Sumbangan dan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
	Bantuan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
			Pengawas		
BM	PENGELOLAAN BARANG				
	MILIK NEGARA (BMN)				
00	Simak BMN	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
		Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
			Pengawas		
01	Pembukuan BMN	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
	 Daftar barang 	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
	kuasa/pengguna		Pengawas		
	2. Kartu Identitas Barang				

	(KIB)				
_	Inventarisasi BMN	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
$\overline{}$	1. Keputusan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
	Pembentukan Tim		Pengawas		
CA	2. Rencana Kerja				
-	Pelaksanaan				
	Inventarisasi				
0.0	3. Kertas kerja				
-	Inventarisasi				
4	4. Berita acara				
	inventarisasi				
LC2	5. Daftar				
	inventaris/buku				
	barang/daftar barang				
Ψ	6. Laporan hasil				

	inventarisasi				
04	Laporan BMN	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
	 Laporan kondisi 	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
	barang		Pengawas		
	2. Laporan barang kuasa				
	pengguna				
	3. Berita acara				
	rekonsiliasi eksternal dan				
	internal				
	4. Laporan persediaan				
	habis pakai				
	5. Laporan persediaan				

	tidak habis pakai 6. Laporan pengelolaan Barang Milik Negara				
02	Rumah Negara	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang	Bagian Umum
			Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
			Pengawas		
90	Tanah	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang	Bagian Umum
			Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
			Pengawas		
40	Penggunaan BMN	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
		Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
			Pengawas		
80	Pemanfaatan BMN				

Bagian Umum	Tidak memiliki dampak yang	Dapat diakses oleh Pimpinan	Biasa/	Pemindahtanganan BMN	Pemin	60
		Pengawas		infrastruktur		
	mengganggu kinerja LPSK	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Terbuka	penyediaan		
Bagian Umum	Tidak memiliki dampak yang	Dapat diakses oleh Pimpinan	Biasa/	Kerjasama	08.04	
		Pengawas		serah guna		
	mengganggu kinerja LPSK	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Terbuka	serah / Bangun		
Bagian Umum	Tidak memiliki dampak yang	Dapat diakses oleh Pimpinan	Biasa/	Bangun guna	08.03	
		Pengawas		BMN		
	mengganggu kinerja LPSK	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Terbuka	pemanfaatan		
Bagian Umum	Tidak memiliki dampak yang	Dapat diakses oleh Pimpinan	Biasa/	Kerjasama	08.02	
		Pengawas				
	mengganggu kinerja LPSK	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Terbuka			
Bagian Umum	Tidak memiliki dampak yang	Dapat diakses oleh Pimpinan	Biasa/	08.01 Pinjam Pakai	08.01	
		Pengawas				
	mengganggu kinerja LPSK	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Terbuka			
Bagian Umum	Tidak memiliki dampak yang	Dapat diakses oleh Pimpinan	Biasa/	08.00 Sewa	08.00	

			Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
				Pengawas		
10	Pengan	Pengamanan dan				
	Pemelil	Pemeliharaan BMN				
	10.00	10.00 Pemeliharaan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
		BMN	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
				Pengawas		
	10.01	Laporan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
		Pengamanan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
		dan/atau		Pengawas		
		pemeliharan				
		BMN				
11	Pengaw	Pengawasan dan				
	pengen	pengendalian BMN				
	11.00	11.00 Pemantauan dan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang	Bagian Umum
		penertiban BMN		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	

				Pengawas		
	11.01	11.01 Laporan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang	Bagian Umum
		pengawasan dan		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
		pengendalian		Pengawas		
		BMN				
12	Pengha	Penghapusan dan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
	Pemusr	Pemusnahan BMN	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
	1. Keputusan	ıtusan		Pengawas		
	pemben	pembentukan tim				
	2. Berit	2. Berita acara				
	pengha	penghapusan BMN				
	3. Dafts	Daftar barang yang				
	dihapus	ø.				
	4. Lapo	4. Laporan hasil				
	pelaksanaan	naan				

	mengganggu kinerja LPSK	lingkat lertinggi ningga Pejabat	Terbuka		
Bagian Umum	Tidak memiliki dampak yang	Dapat diakses oleh Pimpinan	Biasa/	Dokumen Arsitektur	01
				(SIM)	
				Infromasi Manajemen	
		Pengawas		Pembangunan Sistem	
	mengganggu kinerja LPSK	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Terbuka	/Master Plan	
Bagian Umum	Tidak memiliki dampak yang	Dapat diakses oleh Pimpinan	Biasa/	Rencana Strategis	00
				DAN KOMUNIKASI	
				TEKNOLOGI INFORMASI	II
				proses lelang	
				termasuk didalamnya	
				penghapusan BMN	

			Pengawas		
02	Dokumentasi	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
	Implementasi	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
			Pengawas		
03	Perekaman dan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
	Pemutakhiran Data	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
	1. Formulir isian		Pengawas		
	2. Daftar Petugas				
	Perekaman				
	3. Jadwal Pelaksanaan				
	4. Laporan hasil				
	perekaman dan				
	pemutakhiran data				

04	Migrasi Sistem Aplikasi	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
	dan Data	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
	1. Perencanaan migrasi		Pengawas		
	2. Pelaksanaan migrasi				
	3. Berita acara kegiatan				
	migrasi				
	4. Daftar sistem aplikasi				
	dan data yang di migrasi				
	5. Laporan hasil migrasi				
02	Dokumen hosting	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
	1. Formulir permintaan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
	barang		Pengawas		
	2. Laporan hasil uji				
	kelayakan				
	3. Laporan pelaksanaan				
	hosting				

90	Pengan	Pengamanan Jaringan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
	dan Lay	dan Layanan back up	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
	data digital	gital		Pengawas		
20	Lisensi	Lisensi Perangkat TIK	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang	Bagian Umum
	dan Sis	dan Sistem Informasi		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
				Pengawas		
80	Layana	Layanan Pengadaan				
	Secara	Secara Elektronik (LPSE)				
	08.00	08.00 Administrasi	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
		LPSE	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
				Pengawas		
	08.01	Aplikasi LPSE	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
			Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
				Pengawas		
	08.02	Verifikasi	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
		Penyedia	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	

				Pengawas		
	08.03	Akun	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang	Bagian Umum
				Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
				Pengawas		
	08.04	Pelatihan SPSE	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
			Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
				Pengawas		
	08.05	Standar LPSE	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
			Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
				Pengawas		
	90'80	Laporan LPSE	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
			Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
				Pengawas		
BJ	PENGA	PENGADAAN BARANG				

	DAN JASA	ASA				
00	Perence	Perencanaan Pengadaan				
	Barang	Barang dan Jasa				
	00.00	00.00 Rencana Umum	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
		Pengadaan (RUP)	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
				Pengawas		
	00.01	00.01 Rencana dan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
		Analisis	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
		Kebutuhan		Pengawas		
		Barang				
01	Pelakss	Pelaksanaan Pengadaan				
	Barang	Barang dan Jasa				
	01.00	01.00 Lelang umum /	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
		Lelang terbatas	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
				Pengawas		

01.01	01.01 Swakelola /	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
	Pengadaan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
	Langsung/ e -		Pengawas		
	Purchasing/e-				
	catalogue				
01.02	01.02 Penunjukan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
	Langsung	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
			Pengawas		
01.03	01.03 Telaah	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
	pelaksanaan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
	lelang/pemilikan		Pengawas		
	/penunjukan				
	langsung				

01.04	01.04 Dokumen lelang	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
	1. Barang	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
	inventaris		Pengawas		
	kantor/barang				
	bergerak				
	(penawaran				
	pengumuman				
	pemenang,				
	daftar rekanan,				
	sampai dengan				
	kontrak dan				
	serah terima				
	barang)				
	2. Barang				
	invetasi				
	(penawaran				

		pengumuman				
		pemenang,				
		daftar rekanan,				
		sampai dengan				
		kontrak dan				
		serah terima				
		barang)				
02	Monev	Monev Pengadaan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang	Bagian Umum
	Barang	Barang dan Jasa		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
				Pengawas		
ΡW	PENGA	PENGAWASAN				
00	Rencar	Rencana Pengawasan				
	00.00	00.00 Rencana Strategi	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Unit Pengawasan
		Pengawasan		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
				Administrator	LPSK	

	00.01	00.01 Rencana Kerja	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Unit Pengawasan
		Tahunan		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
				Administrator	LPSK	
	00.02	Rencana dan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Unit Pengawasan
		Penetapan		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
		Kinerja Tahunan		Administrator	LPSK	
	00.03	Penetapan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Unit Pengawasan
		Kinerja Tahunan		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
				Administrator	LPSK	
	00.04	Rakor	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Unit Pengawasan
		Pengawasan		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
		Tingkat Nasional		Administrator	LPSK	
01	Pelaksa	Pelaksanaan Pengawasan				
	01.00	01.00 Laporan yang	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Unit Pengawasan
		memerlukan		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
		tindak lanjut		Administrator	LPSK	

01.01	01.01 Laporan yang	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Unit Pengawasan
	tidak		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
	memerlukan		Administrator	LPSK	
	tindak lanjut				
01.02	01.02 Laporan yang	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Unit Pengawasan
	mengandung		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
	unsur tindak		Administrator	LPSK	
	pidana korupsi				
01.03	01.03 Laporan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Unit Pengawasan
	Perkembangan		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
	Penanganan		Administrator	LPSK	
	Pengaduan				
	Masyarakat				
01.04	01.04 Laporan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Unit Pengawasan
	Pemutakihiran		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
	Data Tindak		Administrator	LPSK	

	Lanjut Temuan				
01.05	01.05 Laporan LHKPN	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Unit Pengawasan
	dan LHKASN		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
			Administrator	LPSK	
01.06	01.06 Laporan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Unit Pengawasan
	Perkembangan		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
	Barang Milik		Administrator	LPSK	
	Negara				
01.07	01.07 Laporan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Unit Pengawasan
	Kegiatan		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
	Pendampingan		Administrator	LPSK	
	Penyusunan				
	Laporan				
	Keuangan dan				
	Semesteran				

	LPSK				
01.08	01.08 Good Corporate	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Unit Pengawasan
	Governance		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
	(GCG)		Administrator	LPSK	
01.09	01.09 Laporan Hasil	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Unit Pengawasan
	Evaluasi		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
			Administrator	LPSK	
01.10	01.10 Pemantauan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Unit Pengawasan
			Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
			Administrator	LPSK	
01.11	01.11 Pembangunan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Unit Pengawasan
	Pakta Integritas	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
			Administrator		

	01.12	01.12 Manajemen	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Unit Pengawasan
		Risiko		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
				Administrator	LPSK	
	01.13	Sistem	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Unit Pengawasan
		Pengawasan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
		Internal		Administrator		
		Pemerintah				
		(SPIP)				
	01.14	Pengawasan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Unit Pengawasan
		bidang	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
		keArsipan		Administrator		
HK	HUKUM	M				
00	Prograi	Program Legislasi				
	00.00	00.00 Bahan/materi	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
		program legislasi	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	

nasional dari LPSK	nasional dari LPSK		Pengawas		
00.01 Program legislasi Biasa/ Da	Biasa/	Ď	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
LPSK Terbuka Ting	Terbuka	Ting	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
			Pengawas		
Rancangan Peraturan	ngan Peraturan				
Perundang-undangan	dang-undangan				
01.00 Berkas Biasa/	Biasa/		Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
rancangan Terbuka Ti	Terbuka	Ë	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
proses	proses		Pengawas		
penyusunan	penyusunan				
peraturan	peraturan				
perundang-	perundang-				
undangan yang	undangan yang				
berhubungan	berhubungan				
dengan	dengan				

	Perlindungan				
	Saksi dan				
	Korban				
01.01	01.01 Berkas	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
	rancangan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
	proses		Pengawas		
	penyusunan				
	produk hukum				
	LPSK				
01.02	01.02 Standar /	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
	Pedoman /	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
	Prosedur kerja /		Pengawas		
	petunjuk				
	pelaksanaan /				
	petunjuk teknis				
	yang bersifat				

		nasiional/region				
		al/instansional				
		termasuk				
		rancangan awal				
		sampai dengan				
		rancangan akhir				
	01.03	01.03 Surat Perintah	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
			Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
				Pengawas		
02	Nota K	Nota Kesepahaman /	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
	Memora	Memorandum of	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
	Unders	Understanding		Pengawas		
	(MoU)/	(MoU)/Kontrak/Perjanjia				
	n Kerja	n Kerja Sama dalam				
	Negeri	Negeri dan Luar Negeri				

03	Dokumentasi Hukum	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
	a. Eksternal	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
	Undang-undang,		Pengawas		
	Peraturan				
	Pemerintah, Keputusan				
	Presiden dan Peraturan -				
	peraturan yang dijadikan				
	referensi				
	b. Internal				
	Produk peraturan				
	perundangan LPSK yang				
	dijadikan referensi				
04	Soislisasi / Penyuluhan /				
	Pembinaan Hukum				
	(Pidana, Perdata, Tata				

	Usaha	Usaha Negara dan				
	Agama)					
	04.00	04.00 Bahan Materi	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
		kegiatan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
		sosialisasi/peny		Pengawas		
		ulusan/pembina				
		an hukum				
	04.01	04.01 Laporan Hasil	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
		Pelaksanaan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
		sosialisasi /		Pengawas		
		Penyuluhan/				
		Pembinaan				
		Hukum				
02	Bantua	Bantuan/konsultasi	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
	hukum	hukum/advokasi	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
				Pengawas		

		Biro Administrasi			Biro Administrasi			Biro Administrasi		
		Memiliki dampak yang dapat	mengganggu fungsi dan tugas	LPSK	Memiliki dampak yang dapat	mengganggu fungsi dan tugas	LPSK	Memiliki dampak yang dapat	mengganggu fungsi dan tugas	LPSK
		Dapat diakses oleh Pimpinan	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Tinggi Pratama	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Tinggi Pratama	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Tinggi Pratama
		Terbatas			Terbatas			Terbatas		
Kasus / Sengketa	u	06.00 Pidana			Perdata			06.02 Tata Usaha	Negara	
Kasus	Hukum	00.90			06.01			06.02		
90										

	06.03	06.03 Arbitrase	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Biro Administrasi
				Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
				Tinggi Pratama	LPSK	
40	Telaah	Telaah Hukum				
	00.70	07.00 Telaah Hukum	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
		Regulasi Internal	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
		LPSK		Pengawas		
	07.01	07.01 Telaah Hukum	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
		Eksternal yang	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
		berkaitan		Pengawas		
		dengan LPSK				
80	Perizinan	an				
	08.00	08.00 Pemberian/	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
		Persetujuan/	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
		Kewenangan/		Pengawas		
		Rekomendasi				

				Hak Atas Kekayaan	Hak A	60
		Pengawas				
	mengganggu kinerja LPSK	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Terbuka			
Bagian Hukum	Tidak memiliki dampak yang	Dapat diakses oleh Pimpinan	Biasa/	Dispensasi	08.05	
		Pengawas				
	mengganggu kinerja LPSK	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Terbuka	Izin		
Bagian Hukum	Tidak memiliki dampak yang	Dapat diakses oleh Pimpinan	Biasa/	08.04 Perpanjangan	08.04	
		Pengawas				
	mengganggu kinerja LPSK	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Terbuka			
Bagian Hukum	Tidak memiliki dampak yang	Dapat diakses oleh Pimpinan	Biasa/	08.03 Pencabutan	08.03	
		Pengawas				
	mengganggu kinerja LPSK	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Terbuka			
Bagian Hukum	Tidak memiliki dampak yang	Dapat diakses oleh Pimpinan	Biasa/	Peringatan	08.02	
		Pengawas				
	mengganggu kinerja LPSK	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Terbuka			
Bagian Hukum	Tidak memiliki dampak yang	Dapat diakses oleh Pimpinan	Biasa/	08.01 Penolakan	08.01	

Intelekt	Intelektual (HAKI)				
00.60	09.00 Hak Cipta	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang serius	Biro Administrasi
			Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	terhadap privasi, dapat	
			Tinggi Pratama	merusak kemitraan,	
				kepercayaan, dan reputasi	
				antar instansi	
09.01	09.01 Hak Paten Biasa	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang serius	Biro Administrasi
	dan Sederhana		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	terhadap privasi, dapat	
			Tinggi Pratama	merusak kemitraan,	
				kepercayaan, dan reputasi	
				antar instansi	
09.02	Hak Merek	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang serius	Biro Administrasi
			Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	terhadap privasi, dapat	
			Tinggi Pratama	merusak kemitraan,	
				kepercayaan, dan reputasi	
				antar instansi	

	Bagian Hukum			Bagian Hukum			Bagian Hukum			
	Memiliki dampak yang dapat	mengganggu fungsi dan tugas	LPSK	Memiliki dampak yang dapat	mengganggu fungsi dan tugas	LPSK	Memiliki dampak yang dapat	mengganggu fungsi dan tugas	LPSK	
	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Administrator	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Administrator	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Administrator	
	Terbatas			Terbatas			Terbatas			
Kuasa	10.00 Surat Kuasa	Khusus		10.01 Surat Kuasa	dengan Hak	Substitusi	Surat Kuasa	Lainnya		ORGANISASI DAN TATA
Surat Kuasa	10.00			10.01			10.02			ORGAN
10										OT

	LAKSANA	NA				
00	Struktı	Struktur Organisasi				
	LPSK					
	00.00	00.00 Pembentukan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
			Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
				Pengawas		
	00.01	00.01 Perubahan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
			Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
				Pengawas		
	00.02	00.02 Pembubaran	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
			Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
				Pengawas		
01	Organisasi	sasi				
	01.00	01.00 Standar	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Hukum
		Kompetensi		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
		Jabatan		Pengawas	LPSK	

	01.01	01.01 Evaluasi	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Hukum
		Kelembagaan/Or		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
		ganisasi		Pengawas	LPSK	
	01.02	Uraian Jabatan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Hukum
		dan Tata Kerja		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
				Pengawas	LPSK	
02	Tata Laksana	ksana	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
			Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
				Pengawas		
03	Reform	Reformasi Birokrasi				
	03.00	03.00 Implementasi	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
		Reformasi	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	

Pengawas	Dapat diakses oleh Pimpinan Memiliki dampak yang dapat Bagian Hukum Tingkat Tertinggi hingga Pejabat mengganggu fungsi dan tugas Pengawas LPSK		Dapat diakses oleh Pimpinan Tidak memiliki dampak yang Bagian Hukum	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat mengganggu kinerja LPSK	Pengawas						
Terbatas Dapat dial			Biasa/ Dapat dial	Terbuka Tingkat Ter	_						
Birokrasi	O3.01 Monitoring dan Te Evaluasi Reformasi Birokrasi	KERJASAMA	Perencanaan Kerjasama	antara LPSK dengan To	Kementerian, Lembaga,	Swasta, Organisasi	Masyarakat baik nasional	maupun internasional	Nota Kesepahaman /	Memorandum of	
	03.01	KS KERJ	00 Perend	antars	Kemei	Swast	Masya	manb	01 Nota F	Memo	

	Unders	Understanding (MoU)				
	01.00	01.00 Dalam Negeri	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Hukum
				Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
				Pengawas	LPSK	
	01.01	Luar Negeri	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Hukum
				Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
				Pengawas	LPSK	
02	Perjanji	Perjanjian Kerjasama /				
	Petunju	Petunjuk Teknis				
	Kerjasa	Kerjasama/ Pedoman				
	Kerja					
	01.00	01.00 Dalam Negeri	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Hukum
				Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
				Pengawas	LPSK	
	01.01	Luar Negeri	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Hukum
				Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	

	ı			Pengawas	LPSK	
Penguatar	ıtar	Penguatan dan Evaluasi	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Hukum
Jaringan l	an	Jaringan Kerjasama		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
				Pengawas	LPSK	
INFORMASI DAN	MA	SIDAN				
HUBUNGAN	NG	AN				
MASYARAKAT	S	AKAT				
Keprotokolan	쏭	olan				
00.00		00.00 Penyelenggaraan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
	_	Acara Kedinasan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
				Pengawas		

00.01	00.01 Buku Tamu	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang	Bagian Hukum
			Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
			Pengawas		
00.02	Agenda Kegiatan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Hukum
	Pimpinan		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
			Pengawas	LPSK	
00.03	00.03 Kunjungan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Hukum
	Dinas Dalam		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
	dan Luar Negeri		Pengawas	LPSK	
00.04	Kunjungan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Hukum
	Dinas Eksternal		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
			Pengawas	LPSK	
00.02	00.05 Daftar nama /	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Hukum
	alamat kantor /		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
	Pejabat		Pengawas	LPSK	

	Dokum	Dokumentasi / Peliputan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
			Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
				Pengawas		
02	Pengumpulan,	ıpulan,				
	pengelo	pengelolaan, dan				
	Penyajia	Penyajian Informasi				
	02.01	02.01 Kliping Koran	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
			Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
				Pengawas		
	02.02	Brosur/leaflet/p	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
		oster/plakat	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
				Pengawas		
	02.03	Pengumuman/p	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
		emberitaan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
				Pengawas		

03	Hubun	Hubungan antar				
	Lembag	Lembaga Negara dan				
	Badan					
	Pemerir	Pemerintah/Instansi				
	03.00	03.00 Hubungan Antar	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
		Lembaga	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
		Pemerintah		Pengawas		
	03.01	03.01 Hubungan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
		dengan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
		Organisasi Sosial		Pengawas		
		(LSM)				
	03.02	Hubungan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
		dengan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	

		perusahaan atau		Pengawas		
		pihak swasta				
	03.03	Hubungan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
		dengan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
		perguruan tinggi		Pengawas		
		/ sekolah				
	03.04	Forum	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
		Kehumasan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
		(Bakohumas /		Pengawas		
		Perhumas)				
	03.05	03.05 Hubungan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
		dengan media	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
		massa		Pengawas		
04	Bahan	Bahan Materi Sidang	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Hukum
	atan M	atau Musyawarah		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
	Nasional	al		Pengawas	LPSK	

02	Penerbitan Cetakan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
	(majalah, buletin, koran	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
	dan jurnal)		Pengawas		
90	Publikasi melalui media	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
	cetak, elektronik dan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
	online		Pengawas		
20	Pameran, Sayembara,	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
	Lomba, Festival,	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
	Pembuatan Spanduk dan		Pengawas		
	Iklan				
80	Pemberian	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
	penghargaan/tanda	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
	kenang-kenangan		Pengawas		
10	Pemberian Ucapan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
	terima kasih, ucapan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
	selamat, bela sungkawa,		Pengawas		

	dan pe	dan permohonan maaf				
11	Pidato ata Pimpinan	Pidato atau Sambutan Pimpinan				
	11.00	11.00 Sambutan Pimpinan LPSK	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
	11.01	11.01 Sambutan Esclon I dan II	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
12	Pelayar	Pelayanan PPID				
	12.00	12.00 Permintaan Informasi Publik	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum

12.01	12.01 Tanda Bukti	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
	Penerimaan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
	Permintaan		Pengawas		
	Informasi Publik				
12.02	Pemberitahuan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
	Tertulis	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
	Permintaan		Pengawas		
	Informasi masih				
	dalam proses				
12.03	12.03 Tanda Bukti	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
	Penyerahan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
	Permintaan		Pengawas		
	Informasi Publik				
12.04	Pernyataan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Hukum
	Keberatan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
			Pengawas		

AR	KEARSIPAN	IPAN				
00	Admini	Administrasi Persuratan				
	00.00	00.00 Kartu Kendali	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian TU dan
			Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	Persuratan
				Pengawas		
	00.01	00.01 Buku Agenda	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian TU dan
			Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	Persuratan
				Pengawas		
	00.02	Lembar	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian TU dan
		Pengantar /	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	Persuratan
		buku Ekspedisi		Pengawas		
	00.03	Formulir /	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian TU dan
		catatan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	Persuratan
		permintaan dan		Pengawas		
		layanan				

		penggandaan				
		dokumen / Arsip				
01	Penyim	Penyimpanan dan				
	Pemelil	Pemeliharaan Arsip				
	01.00	01.00 Daftar Arsip	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian TU dan
		diantaranya		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	Persuratan
		Arsip Dinamis,		Pengawas	LPSK	
		Arsip informasi				
		publik dan Arsip				
		vital				
	01.01	01.01 Daftar Pencarian	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian TU dan
		Arsip		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	Persuratan
				Pengawas	LPSK	
	01.02	Pemeliharaan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian TU dan
		Arsip dan ruang		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	Persuratan
		penyimpanan		Pengawas	LPSK	

02	Persetu	Persetujuan Jadwal	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian TU dan
	Retensi Arsip	Arsip	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	Persuratan
				Pengawas		
03	Layana	Layanan Arsip	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian TU dan
	(Pemin)	(Peminjaman dan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	Persuratan
	Penggu	Penggunaan Arsip)		Pengawas		
04	Penyus	Penyusutan Arsip				
	04.00	04.00 Pemindahan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian TU dan
		Arsip Inaktif		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	Persuratan
		a. Berita acara		Pengawas	LPSK	
		pemindahan				
		b. Daftar Arsip				
		yang				
		dipindahkan				

04.01	04.01 Pemusnahan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian TU dan
	Arsip yang Tidak		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	Persuratan
	Bernilai Guna		Pengawas	LPSK	
	a. Berita acara				
	pemusnahan				
	b. Daftar Arsip				
	yang				
	dimusnahkan				
	с.				
	Rekomendasi/pe				
	rtimbangan/pers				
	etujuan				
	pemusnahan				
	Arsip dari Unit				
	Kerja Terkait dan				
	ANRI				

		d. Surat				
		keputusan				
		pemusnahan				
	04.02	04.02 Penyerahan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian TU dan
		Arsip Statis		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	Persuratan
		a. Berita acara		Pengawas	LPSK	
		serah terima				
		Arsip				
		b. Daftar Arsip				
		yang diserahkan				
05	Berkas	Berkas Proses Alih Media	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian TU dan
	Arsip		Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	Persuratan
				Pengawas		
90	Pembin	Pembinaan KeArsipan				

	00.90	06.00 Apresiasi,	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian TU dan
		Sosialisasi dan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	Persuratan
		Penyuluhan		Pengawas		
		KeArsipan/Loka				
		karya/Workshop				
	06.01	Bimbingan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian TU dan
		teknis keArsipan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	Persuratan
				Pengawas		
	06.02	Supervisi,	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian TU dan
		evaluasi dan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	Persuratan
		monitoring		Pengawas		
20	Akredit	Akreditasi KeArsipan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian TU dan
				Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	Persuratan
				Administrator	LPSK	
80	Audit K	Audit KeArsipan (internal	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian TU dan
	dan eks	dan eksternal)		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	Persuratan

				Administrator	LPSK	
KEPUSTAKAAN	TAKA	AN				
Penyimpanan Deposit	pana	n Deposit				
Bahan Pustaka	Pust	aka				
00.00 Bukti	Bu	kti	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian TU dan
Pen	Per	Penerimaan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	Persuratan
kol	kol	koleksi deposit		Pengawas		
bał	bal	bahan pustaka				
00.01 Administrasi	Αd	ministrasi	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian TU dan
bei	pe	pengolahan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	Persuratan
De	De	Deposit Bahan		Pengawas		
Pu	Pu	Pustaka				
	_					

Pengad	Pengadaan dan				
Pengola	Pengolahan Bahan				
Pustaka	ø				
01.00	01.00 Buku Induk	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian TU dan
	Koleksi	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	Persuratan
			Pengawas		
01.01	01.01 Daftar Buku	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian TU dan
	Terseleksi	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	Persuratan
			Pengawas		
01.02	01.02 Daftar Buku	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian TU dan
	dalam	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	Persuratan
	pemesanan		Pengawas		

01.03	01.03 Daftar Buku	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian TU dan
	dalam	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	Persuratan
	Permintaan		Pengawas		
01.04	Daftar	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian TU dan
	penerimaan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	Persuratan
	bahan pustaka		Pengawas		
	hasil pembelian,				
	hadiah, deposit				
	dan hibah				
01.05	01.05 Daftar	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian TU dan
	Penerimaan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	Persuratan
	bahan pustaka		Pengawas		
	surplus				
01.06	01.06 Lembar kerja	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian TU dan
	pengolahan BP	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	Persuratan
	(buram		Pengawas		

	L	pengkatalogan)				
	01.07	01.07 Shelf List dan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian TU dan
		Master List	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	Persuratan
				Pengawas		
	01.08	01.08 Daftar tambahan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian TU dan
		koleksi	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	Persuratan
				Pengawas		
	01.09	Daftar jajaran	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian TU dan
		kendali	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	Persuratan
				Pengawas		
02	Layanan Jasa	ın Jasa				
	Perpus	Perpustakaan dan				
	Informasi	asi				
	05.00	02.00 Data dan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian TU dan
		statistik anggota,	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	Persuratan
				•		•

		pengunjung dan		Pengawas		
		peminjaman				
		bahan pustaka				
	02.01	Pertanyaan,	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian TU dan
		rujukan, dan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	Persuratan
		jawaban		Pengawas		
03	Preserv	Preservasi Bahan				
	Pustaka	E				
	03.00	03.00 Survei Kondisi	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian TU dan
_		Bahan Pustaka	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	Persuratan
				Pengawas		
	03.01	Repografi Bahan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian TU dan
		Pustaka	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	Persuratan
				Pengawas		
	03.02	Fumigasi Bahan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian TU dan
		Pustaka	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	Persuratan

				Bagian Umum					Bagian Umum			Bagian Umum	
				Tidak memiliki dampak yang	mengganggu kinerja LPSK				Tidak memiliki dampak yang	mengganggu kinerja LPSK		Tidak memiliki dampak yang	mengganggu kinerja LPSK
Pengawas				Dapat diakses oleh Pimpinan	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Pengawas			Dapat diakses oleh Pimpinan	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Pengawas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat
				Biasa/	Terbuka				Biasa/	Terbuka		Biasa/	Terbuka
	KEPEGAWAIAN	Kebijakan di bidang	manajemen kepegawaian	00.00 Pengkajian,	Pengusulan	Kebijakan, dan	Naskah	Akademik	00.01 Penyusunan	kebijakan		Perumusan	kebijakan
	KEPEG	Kebijak	manaje	00.00					00.01			00.02	
	KP	00											

				Pengawas		
	00.03	00.03 Pemberian	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
		masukan dan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
		dukungan		Pengawas		
	00.04	00.04 Penetapan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
		kebijakan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
				Pengawas		
	00.02	00.05 Memorandum of	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Umum
		Understanding		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
		bidang		Pengawas	LPSK	
		kepegawaian				
01	Penyus	Penyusunan dan				Bagian Umum
	Penetap	Penetapan Kebutuhan				
	Aparatu	Aparatur Sipil Negara				

	01.00	01.00 Perencanaan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
		Kebutuhan ASN	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
				Pengawas		
	01.01	01.01 Perencanaan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
		Pertimbangan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
		Formasi		Pengawas		
	01.02	01.02 Penetapan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
		Kebutuhan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
		Aparatur Sipil		Pengawas		
		Negara				
	01.03	01.03 Standarisasi	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
		Jabatan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
				Pengawas		
02	Formas	Formasi dan Pengadaan				
	Pegawai	ij				

03.00	03.00 Formasi ASN	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
		Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
			Pengawas		
03.01	03.01 Pengadaan ASN	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
	1. Proses	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
	penerimaan		Pengawas		
	pegawai				
	2. Penetapan				
	pengumuman				
	kelulusan				
	3. Berkas				
	lamaran yang				
	tidak diterima				
	4. Nota usul dan				
	kelengkapan NIP				
	e. Nota usul				

		pengangkatan				
		CPNS menjadi				
		PNS lebih 2				
		tahun				
		f. Surat				
		keputusan CPNS				
		/ PNS Kolektif				
	03.02	Sistem	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
		Rekrutmen ASN	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
				Pengawas		
60	Mutasi	Mutasi Pegawai				
	03.00	03.00 Usulan Mutasi	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Umum
		Pegawai		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
				Administrator	LPSK	
	03.01	Persetujuan/Pert	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
		imbangan Kepala	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	

	BKN		Pengawas		
03.02	03.02 Berita Acara	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Umum
	Pelantikan dan		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
	Serah Terima		Administrator	LPSK	
	Jabatan				
03.03	03.03 Mutasi Keluarga	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Umum
	1. Surat izin		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
	pernikahan/perc		Administrator	LPSK	
	eraian				
	2. Surat				
	penolakan izin				
	3. Akta				
	nikah/cerai				
	4. Akta kelahiran				
	anak				

	5. Surat				
	keterangan				
	meninggal dunia				
03.04	Usulan kenaikan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Umum
	pangkat/golonga		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
	n/jabatan		Administrator	LPSK	
03.05	Usul	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Umum
	pengangkatan,		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
	pembebasan		Administrator	LPSK	
	sementara dan				
	pemberhentian				
	dalam jabatan				
	struktural/fungs				
	ional				

	03.06	03.06 Usul penetapan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Umum
		perubahan data		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
		dasar/status/ke		Administrator	LPSK	
		dudukan hukum				
		pegawai				
	03.07	Usulan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
		Peninjauan Masa	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	dapat mengganggu fungsi dan	
		Kerja		Pengawas	tugas LPSK	
	03.08	Berkas badan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang	Bagian Umum
		pertimbangan		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
		jabatan dan		Administrator		
		pangkat				
04	Pengen	Pengembangan Karir				
	04.00	04.00 Usulan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
		Pengembangan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
		Karir		Pengawas		

	mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator		kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)
Bagian Umum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Terbatas	Laporan hasil kekayaan
		Pengawas		
	mengganggu kinerja LPSK	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Terbuka	Pegawai
Bagian Umum	Tidak memiliki dampak yang	Dapat diakses oleh Pimpinan	Biasa/	04.03 Pakta Integritas
	LPSK	Administrator		bagi ASN
	mengganggu fungsi dan tugas	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat		Pegawai (SKP)
Bagian Umum	Memiliki dampak yang dapat	Dapat diakses oleh Pimpinan	Terbatas	Sasaran Kinerja
				/ Sertifikat
				latihan (STTPL)
		Pengawas		pendidikan dan
	mengganggu kinerja LPSK	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Terbuka	tamat
Bagian Umum	Tidak memiliki dampak yang	Dapat diakses oleh Pimpinan	Biasa/	04.01 Surat tanda

	04.05	04.05 Daftar usul	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Umum
		penetapan angka		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
		kredit (DUPAK)		Administrator	LPSK	
	04.06	04.06 Disiplin pegawai	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Umum
		1. Daftar hadir		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
		Rekapitulasi		Administrator	LPSK	
		daftar hadir				
	04.07	Berkas	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Umum
		Hukuman		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
		Disiplin		Administrator	LPSK	
	04.08	04.08 Penghargaan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
		dan Tanda Jasa	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
				Pengawas		
02	Kinerja					
	02.00	05.00 Hasil Penilaian	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Umum
		kinerja dan		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	

	kerja Administrator LPSK	laan Terbatas Dapat diakses oleh Pimpinan Memiliki dampak yang dapat Bagian Umum	e dan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat mengganggu fungsi dan tugas	sistem Administrator LPSK	si kinerja	ASN	aluasi Terbatas Dapat diakses oleh Pimpinan Memiliki dampak yang dapat Bagian Umum	nantauan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat mengganggu fungsi dan tugas	Administrator			
	standar kerja	05.01 Pengelolaan	database dan	analisis sistem	informasi kinerja	pegawai ASN	Hasil Evaluasi	dan Pemantauan	KInerja			
		05.01					05.02					_
•		_										_

90	Kode E	Kode Etik, Disiplin,				
	Pember	Pemberhentian dan				
	Pensiun ASN	1 ASN				
	00.90	06.00 Kode etik	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Umum
		pegawai		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
				Administrator	LPSK	
	06.01	06.01 Disiplin Pegawai	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Umum
				Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
				Administrator	LPSK	
	06.02	Pemberhentian	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Umum
				Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
				Administrator	LPSK	
	06.03	Pensiun	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Umum
				Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	

		Bagian Umum			Bagian Umum					Bagian Umum			Bagian Umum	
LPSK		Memiliki dampak yang dapat	mengganggu fungsi dan tugas	LPSK	Memiliki dampak yang dapat	mengganggu fungsi dan tugas	LPSK			Memiliki dampak yang dapat	mengganggu fungsi dan tugas	LPSK	Memiliki dampak yang dapat	mengganggu fungsi dan tugas
Administrator		Dapat diakses oleh Pimpinan	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Administrator	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Administrator			Dapat diakses oleh Pimpinan	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Administrator	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat
		Terbatas			Terbatas					Terbatas			Terbatas	
	Bantuan Hukum	07.00 Pemberian	Bantuan Hukum		Bantuan Hukum	Pegawai		Status dan Kedudukan	ıi	Pertimbangan	Status	Kepegawaian	Pertimbangan	Kedudukan
	Bantus	00'.00			07.01			Status	Pegawai	08.00			08.01	
	20							80						

		Kepegawaian		Administrator	LPSK	
	08.02	08.02 Penyelesiaian	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Umum
		pengelolaan		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
		keberatan		Administrator	LPSK	
		kepegawaian				
	08.03	08.03 Perselisihan /	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Umum
		sengketa		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
		kepegawaian		Administrator	LPSK	
60	Sistem	Sistem Informasi				
	Kepegawaian	waian				
	00.60	09.00 Pengolahan data	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Umum
		dan informasi		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
		kepegawaian		Administrator	LPSK	
	09.01	09.01 Pengembangan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
		sistem informasi	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	

		kepegawaian		Pengawas		
10	Pengaw	Pengawasan dan				
	Pengendalian	dalian				
	10.00	10.00 Formasi,	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
		pengadaan dan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
		pasca diklat		Pengawas		
	10.01	10.01 Kepangkatan,	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Umum
		pengangkatan,		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
		dan		Administrator	LPSK	
		pemberhentian				
		dalam jabatan				
	10.02	10.02 Gaji, tunjangan,	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
		kesejahteraan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
		dan kinerja		Pengawas		

	10.03	10.03 Kode etik,	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Umum
		disiplin,		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
		pemberhentian		Administrator	LPSK	
		dan pensiun ASN				
	10.04	Laporan Hasil	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Umum
		Pengawasan dan		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
		Pengendalian		Administrator	LPSK	
	10.05	Berkas	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Umum
		sanggahan		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
		terhadap		Administrator	LPSK	
		Permasalahan				
		tenaga Honorer				
11	Admini	Administrasi Pegawai				
	11.00	11.00 Surat Perintah	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
		Dinas / Surat	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
		Tugas		Pengawas		

1	1.01	11.01 Cuti Sakit, cuti	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
		bersalin, dan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
		cuti tahunan		Pengawas		
1	1.02	11.02 Cuti Alasan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
		Penting	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
				Pengawas		
1	1.03	11.03 Cuti besar dan	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
		cuti diluar	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
		tanggungan		Pengawas		
		Negara				
1	11.04	Dokumentasi	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Umum
		identitas pegawai		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
		1. Usul		Administrator	LPSK	
		penetapan kartu				
		2. Keanggotaan				
		organisasi				

	3. Laporan pajak				
	Penghasilan				
	Pribadi (LP2P /				
	SPT Tahunan				
	/NPWP				
	4. Keterangan				
	penerimaan				
	pembayaran				
	penghasilan				
	pegawai (KP4)				
11.05	11.05 Berkas	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Umum
	kepegawaian dan		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
	daftar urut		Administrator	LPSK	
	kepangkatan				
	(DUK)				

				The section of the se		
				Keseiahteraan Pegawai	Keseial	12
		Pengawas				
	mengganggu kinerja LPSK	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Terbuka	pegawai		
Bagian Umum	Tidak memiliki dampak yang	Dapat diakses oleh Pimpinan	Biasa/	11.09 Penghargaan	11.09	
				keluarga		
	LPSK	Administrator		pendaftaran		
	mengganggu fungsi dan tugas	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat		pegawai dan		
Bagian Umum	Memiliki dampak yang dapat	Dapat diakses oleh Pimpinan	Terbatas	Berkas status	11.08	
	LPSK	Administrator		Pegawai		
	mengganggu fungsi dan tugas	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat		Kehadiran		
Bagian Umum	Memiliki dampak yang dapat	Dapat diakses oleh Pimpinan	Terbatas	Berkas	11.07	
				gaji/tunjangan		
				berkala, mutasi		
		Pengawas		kenaikan gaji		
	mengganggu kinerja LPSK	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Terbuka	pengurusan		
Bagian Umum	Tidak memiliki dampak yang	Dapat diakses oleh Pimpinan	Biasa/	11.06 Berkas	11.06	

12.00	12.00 Berkas tentang	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
	Layanan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
	Pemeliharaan		Pengawas		
	Kesehatan				
	Pegawai				
12.01	Berkas tentang	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
	Layanan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
	Asuransi		Pengawas		
	Pegawai/BPJS				
12.02	Berkas tentang	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
	Layanan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
	Tabungan		Pengawas		
	Perumahan				
12.03	12.03 Berkas tentang	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
	Layanan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
	Bantuan Sosial		Pengawas		

12.04	12.04 Berkas tentang	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
	Layanan Pakaian	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
	Dinas		Pengawas		
12.05	Berkas tentang	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Umum
	Layanan Pegawai		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
	yang meninggal		Administrator	LPSK	
	Karena Dinas				
12.06	Berkas tentang	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
	Pemberian Tali	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
	Kasih		Pengawas		
12.07	Berkas tentang	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
	Pemberian	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
	Piagam		Pengawas		
	Penghargaan				
	dan Tanda Jasa				

	12.08	12.08 Berkas tentang	Biasa/	Dapat diakses oleh Pimpinan	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Umum
		Layanan	Terbuka	Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu kinerja LPSK	
		Olahraga dan		Pengawas		
		Rekreasi				
	12.09	12.09 Berkas tentang	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Umum
		Medical Record		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
				Administrator	LPSK	
13	Administrasi	strasi				
	Perseorangan	rangan				
	13.00	13.00 Berkas	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Menimbulkan kerugian yang	Bagian Perencanaan
		Perseorangan		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	serius terhadap privasi,	dan Keuangan
		Pegawai Negeri		Administrator	keuntungan kompetitif,	
		Sipil			hilangnya kepercayaan, serta	
					merusak kemitraan dan	
					reputasi	

13.01	13.01 Berkas	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Menimbulkan kerugian yang	Bagian Perencanaan
	Perseorangan		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	serius terhadap privasi,	dan Keuangan
	PPPK		Administrator	keuntungan kompetitif,	
				hilangnya kepercayaan, serta	
				merusak kemitraan dan	
				reputasi	
13.02	13.02 Berkas	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Menimbulkan kerugian yang	Bagian Perencanaan
	Perseorangan		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	serius terhadap privasi,	dan Keuangan
	Anggota LPSK		Administrator	keuntungan kompetitif,	
				hilangnya kepercayaan, serta	
				merusak kemitraan dan	
				reputasi	

	13.03	13.03 Berkas	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan	Menimbulkan kerugian yang	Bagian Perencanaan
		Perseorangan		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	serius terhadap privasi,	dan Keuangan
		ASN yang		Administrator	keuntungan kompetitif,	
		berjasa atau			hilangnya kepercayaan, serta	
		terlibat dalam			merusak kemitraan dan	
		peristiwa			reputasi	
		berskala				
		nasional				
14	Penilai	Penilaian Kompetensi				
	14.00	14.00 Berkas Penilaian	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Umum
		Kompetensi		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
				Administrator	LPSK	
	14.01	Hasil Penilaian	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Umum
		Kompetensi		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	mengganggu fungsi dan tugas	
				Administrator	LPSK	
15	Pendek	Pendelegasian wewenang				

	mum		mum	mnm
Bagian Umum	Bagian Umum		Bagian Umum	Bagian Umum
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK
Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas		Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas
Biasa/ Terbuka	Biasa/ Terbuka		Biasa/ Terbuka	Biasa/ Terbuka
15.00 Pelaksana Tugas (Plt.)	Pelaksana Harian (Plh.)	Perkumpulan Pegawai dan Non Pegawai	16.00 KORPRI	Dharma Wanita
15.00	15.01	Perkun dan No	16.00	16.01
		16		

16	16.02 Koperasi	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
16	16.03 Lainnya	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HASTO ATMOJO SUROYO